

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Santoso, Urip, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.
- Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soetiknjo, Iman, 1994, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet. 3, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika & Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hamsah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Publishing, USA: Minnesota.
- Wiranata, I.G., 2004, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM.

- _____, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siahaan, Maruarar, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ramdhan, M. Isnaeni, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Sumadi, A.F., 2013, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Mahfud, M.D, dkk, 2010, *Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, UB Press, Malang.
- Alrasyid, Harun, *Hak Menguji dalam Teori dan Praktek*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Vol. 1 Nomor 1, 2004: 95.
- Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Vol. 6 Nomor 1, 2009: 81.
- Mas, Marwan, *Mengurai Putusan Pembatalan UU Nomor 45 Tahun 1999*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Vol. 1 Nomor 1, 2004: 17
- Iriyanto dan Ence, Baso, 2008, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta.
- Wahyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H.S., Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Swasta Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

C. INTERNET

Gentur Putro Jati, "Jumlah Petani Menyusut, Data Produksi Pertanian Dipertanyakan", <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160209120620-92-109708/jumlah-petani-menyusut-data-produksi-pertanian-dipertanyakan>, www.cnnindonesia.com, diakses pada 29 Desember 2016, Pukul 23.22 WIB

Pramesti, T.J.A., "Arti Putusan yang Final dan Mengikat", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat>, www.hukumonline.com, diakses pada 29 Desember 2016, Pukul 23.40 WIB

Indra Nugraha, "UU Perkebunan Berpotensi Timbulkan Masalah Sosial dan Lingkungan", <http://www.mongabay.co.id/2015/02/19/uu-perkebunan-berpotensi-timbulkan-masalah-sosial-dan-lingkungan/>, www.mongabay.co.id, diakses pada 17 Januari 2017, Pukul 12.01 WIB

Ayat S. Karokaro, "Konflik Lahan, 12 Warga Sumut Dipidana dalam 2014", <http://www.mongabay.co.id/2015/01/01/konflik-lahan-12-warga-sumut-dipidana-dalam-2014/>, www.mongabay.co.id,

diakses pada 17 Januari 2017, Pukul 12.05 WIB

Pernyataan Pers Bersama, PILNET-ELSAM-WALHI-KPA-SPP-HuMa-Sawit Watch-Sitas Desa-TuK Indonesia-ICW-AURIGA-YLBHI, "UU Perkebunan Kembali Hidupkan Represi Negara Terhadap Perjuangan Petani", <http://www.kpa.or.id/news/blog/uu-perkebunan-kembali-hidupkan-represi-negara-terhadap-perjuangan-petani/>, www.kpa.or.id, diakses pada 17 Januari 2017, Pukul 12.08 WIB